



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2023

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PEKANBARU**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9, Tuah Madani, Pekanbaru, Riau, Kode Pos: 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455, Email: peratun@ptun-pekanbaru.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan kegiatan ini. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Berakhirnya tahun 2023 menandakan berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan ditahun 2023, dimana PTUN Pekanbaru terus berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*),

Secara keseluruhan, Laporan Kegiatan Tahun 2023 ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan diharapkan berujung pada peningkatan pelayanan publik dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dan aparatur pengadilan TUN di Propinsi Riau



Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi segenap Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah mampu memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ditahun berikutnya.

Pekanbaru, 11 Januari 2024
Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.
NIP. 19600420 198003 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KEADAAN & PENYELESAIAN PERKARA	
A KEADAAN PERKARA	4
1. KEADAAN PERKARATINGKAT PERTAMA	4
2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING	7
3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI.....	8
4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI	9
B PENYELESAIAN PERKARA	10
1. JUMLAH SISA PERKARA YANG PUTUS	10
2. JUMLAH PERKARA YANG PUTUS TEPAT WAKTU	10
3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK	12
C AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO DIPENGADILAN).....	13
1. POSBAKUM.....	13
2. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA).....	14
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
A. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN	15
B. PROMOSI & MUTASI	19
C. Pensiun.....	20
D DIKLAT (SDM TEKNIKS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)	21
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	25
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	29
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	31
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	33
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	37
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK	38
BAB VI PENGAWASAN	
A. PENGAWASAN INTERNAL	47
B. EVALUASI.....	52
BAB VII PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	53
B. REKOMENDASI	54



DAFTAR TABEL

Tabel 1a. Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	5
Tabel 1b. Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	6
Tabel 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	7
Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	8
Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	9
Tabel 5. Jumlah sisa perkara tingkat banding yang diputus tahun 2023	10
Tabel 6. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus tepat waktu	11
Tabel 7. Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	14
Tabel 8. Perkara Prodeo Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	14
Tabel 9. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	16
Tabel 10. SDM berdasarkan kelompok Golongan	18
Tabel 11. SDM berdasarkan kelompok Pendidikan	19
Tabel 14. Mutasi masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	19
Tabel 15. Mutasi Keluar dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	20
Tabel 16. Diklat dan Bimbingan Teknis Bagi Hakim, Pegawai dan PPNPN	21
Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 01	26
Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 05	26
Tabel 19. Realisasi PNBPA DIPA 01 Tahun 2023	27
Tabel 20. Realisasi PNBPA DIPA 05 Tahun 2023	28
Tabel 21. Daftar Tanah	29
Tabel 22. Daftar PSP Tanah & Gedung	30
Tabel 23. Daftar PSP Kendaraan dinas	30
Tabel 24. Daftar PSP Mesin Non TIK	30
Tabel 25. Daftar PSP Mesin TIK	31
Tabel 26. Implementasi E-Court Tahun 2023	32
Tabel 27. Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	34
Tabel 28. Inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	39
Tabel 29. Pengawasan bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	50



BAB 1

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM

Subjek di Peratun adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sementara itu yang menjadi objek di Peratun adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah (eksekutif).

Kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.



Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan pengawasan dan kontrol terhadap keputusan dan kebijakan pimpinan daerah 12 (dua belas) kabupaten kota sebagai wilayah hukum, yang meliputi :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Kota Pekanbaru | 7. Kabupaten Rohul |
| 2. Kota Dumai | 8. Kabupaten Rokan Hilir |
| 3. Kabupaten Kampar | 9. Kabupaten Indragiri Hulu |
| 4. Kabupaten Pelalawan | 10. Kabupaten Indragiri Hilir |
| 5. Kabupaten Siak | 11. Kabupaten Kuantan Singingi |
| 6. Kabupaten Bengkalis | 12. Kabupaten Kepulauan Meranti |

Upaya untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, terwujud dan terlihat dengan diperolehnya Predikat Keempat Terbaik dalam Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023 dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Beban Perkara 51-100;

Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru turut memperbaiki diri dengan menyediakan pelayanan prima pada:

1. Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang profesional, serta sesuai protokol kesehatan;
2. Penerapan aplikasi *E-Court* dengan fitur *e-filling* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e- payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi *E-Court* pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat saja tanpa harus datang ke pengadilan;
3. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengikuti penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, walaupun belum berhasil memperoleh predikat WBK.



B. VISI & MISI

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memiliki visi dan misi yang sama dengan organisasi induknya, yaitu

VISI:

"MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU YANG AGUNG."

MISI:

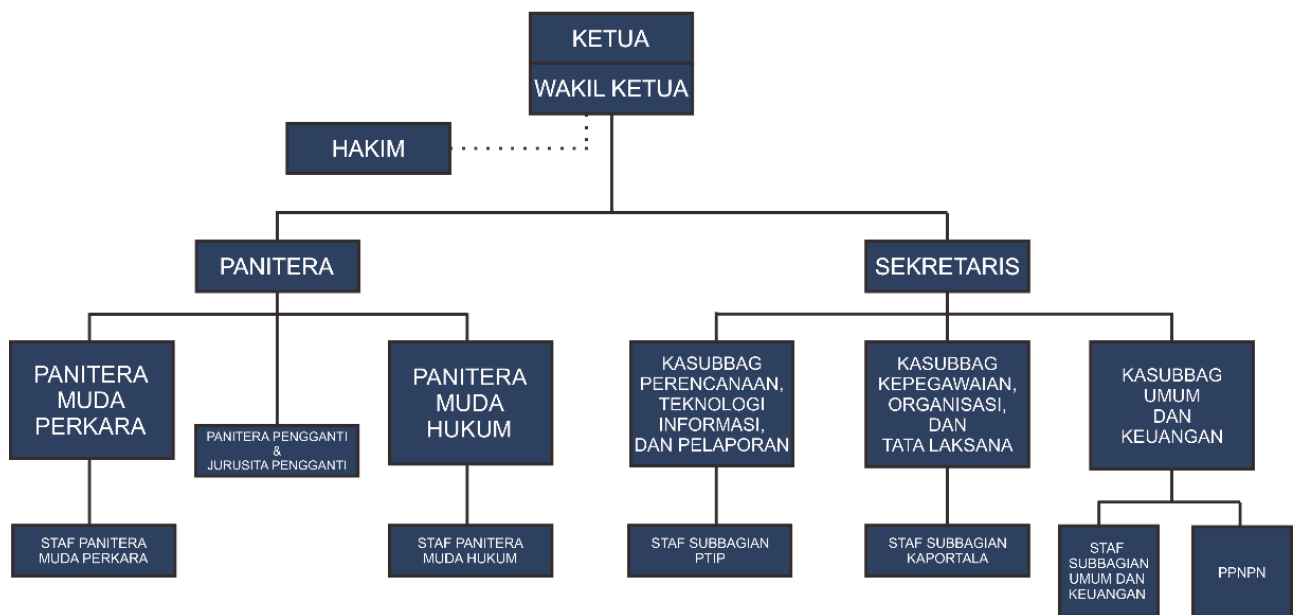
Misi adalah upaya pencapaian visi, Pengadilan TUN Pekanbaru menguraikannya dalam 4 (empat) pilar misi dalam rangka mencapai visi tersebut, yaitu.

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan TUN pada pasal 105 Ayat 2, disebutkan bahwa: "Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung". Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TUN PEKANBARU TAHUN 2022 SESUAI DENGAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015





BAB 2

KEADAAN, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TUN PEKANBARU

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Sisa perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Tahun 2022 ada sebanyak 28 perkara, dan selama tahun 2023 perkara yang diterima dan/atau masuk adalah 54 perkara. Sehingga perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak **28 perkara + 54 perkara = 82 perkara**.



Tabel 1.a Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2023

Jenis Perkara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
GUGATAN												
a. Sisa Tahun 2022	28 Perkara											
b. Masuk	4	5	5	2	2	4	2	4	9	7	8	2
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
d. Putus	9	3	7	3	5	4	5	5	2	5	3	4
e. Sisa Tahun 2023	22 Perkara											
PERMOHANNAN												
a. Sisa Tahun 2022	0 Perkara											
b. Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Sisa Tahun 2023	0 Perkara											

Berikut ini rincian keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2023, yaitu:

a. Jumlah Perkara yang harus di proses / diselesaikan **82** perkara

b. Proses Penyelesaian Perkara:

(1) Putus tahun 2023 55 perkara

(2) Dismissal 1 Perkara

(3) Dicabut 4 perkara

TOTAL 60 perkara

Sehingga sisa perkara pada tahun 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah 82 perkara – 60 perkara = **22 perkara**



Tabel 1.b Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2023

No	Perkara	Sisa Th. 2023		Masu k Th. 2023	Cabut	Putus Th. 2023	Sisa Tahun ini
A	B	C		D	E	G	H = (C+D)-(E+G)
	GUGATAN						
1	Pertanahan	10		30	2	27	11
2	Kepegawaian	0		1	1	0	0
3	Perizinan	2		3	0	4	1
4	Lingkungan hidup	0		0	0	0	0
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	2		1	0	3	0
6	Badan Hukum / Parpol	0		0	0	0	0
7	Kepala Desa dan Perangkat Daerah	0		1	0	0	1
8	Kepala Daerah	0		0	0	0	0
9	Proses Pemilihan Umum	0		0	0	0	0
10	Pergantian Antar Waktu	1		2	0	1	2
11	Ketenagakerjaan	0		0	0	0	0
12	Sengketa Informasi Publik (KIP)	3		2	0	3	2
13	Pengadaan tanah	0		0	0	0	0
14	Filtif Positif	0		0	0	0	0
15	Penyalahgunaan Wewenang	0		0	0	0	0
16	Tindakan Administratif Pemerintah	5		7	0	10	2
17	Lain-lain	5		7	2	7	3
	JUMLAH	28		54	5	55	22



2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Sisa perkara yang dimohonkan Banding pada tahun 2022 sebanyak 17 perkara. Pada tahun 2023 telah diterima perkara yang dimohonkan banding sebanyak 38 perkara. Berikut ini rincian keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2023.

Tabel 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jenis Perkara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
GUGATAN												
a. Sisa Tahun 2022	17 Perkara											
b. Masuk	4	3	4	4	3	1	3	4	2	2	3	5
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	4	4	5	0	7	3	5	4	2	5	1	4
e. Sisa Tahun 2023	11 Perkara											

Berikut ini rincian keadaan perkara yang mengajukan banding tahun 2023, yaitu:

a. Jumlah Perkara : **17 Perkara + 38 Perkara = 55 Perkara**

b. Proses Penyelesaian Perkara:

(1) Putus tahun 2023 44 perkara

(2) Dicabut 0 perkara

TOTAL 44 perkara

Sisa perkara yang dimohonkan banding pada tahun 2023 adalah 55 perkara – 44 perkara = **11 perkara.**



3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Sisa perkara yang dimohonkan tingkat Kasasi pada tahun 2022 sebanyak 12 perkara. Pada tahun 2023 telah diterima perkara yang dimohonkan Kasasi sebanyak 32 perkara. Berikut ini rincian keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mengajukan kasasi tahun 2023.

Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jenis Perkara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
GUGATAN												
a. Sisa Tahun 2022	12 Perkara											
b. Masuk	2	0	6	1	3	4	3	3	2	3	3	2
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	3	2	3	-	-	3	-	1	4	3	5	4
e. Sisa Tahun 2023	16 Perkara											

Berikut ini rincian keadaan perkara yang mengajukan kasasi tahun 2023, yaitu:

a. Jumlah Perkara : **12 Perkara + 32 Perkara = 44 Perkara**

b. Proses Penyelesaian Perkara:

(1) Putus tahun 2023 28 perkara

(2) Dicabut 0 perkara

TOTAL 28 perkara

Sisa perkara yang dimohonkan banding pada tahun 2023 adalah 44 perkara – 28 perkara = **16 perkara**



4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Sisa perkara yang dimohonkan peninjauan kembali pada tahun 2022 sebanyak 13 perkara. Pada tahun 2023 telah diterima perkara yang dimohonkan Kasasi sebanyak 10 perkara. Berikut ini rincian keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mengajukan Peninjauan Kembali tahun 2023

Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Jenis Perkara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
GUGATAN												
a. Sisa Tahun 2022	13 Perkara											
b. Masuk	2	0	0	2	2	0	1	1	0	0	2	0
c. Cabut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Putus	1	0	2	1	1	0	2	3	0	1	0	0
e. Sisa Tahun 2023	12 Perkara											

Berikut ini rincian keadaan perkara yang mengajukan peninjauan kembali tahun 2023, yaitu:

c. Jumlah Perkara : **13 Perkara + 10 Perkara = 23 Perkara**

d. Proses Penyelesaian Perkara:

(3) Putus tahun 2023 11 perkara

(4) Dicabut 0 perkara

TOTAL 11 perkara

Sisa perkara yang dimohonkan banding pada tahun 2023 adalah 23 perkara – 11 perkara = **12 perkara**



B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Pada tahun 2023 terdapat total 82 perkara yang harus diselesaikan, 28 perkara adalah sisa perkara dari tahun 2022, sedangkan 54 perkara masuk pada tahun 2023. Berikut ini rincian jumlah sisa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2023 yang telah diputus tepat waktu pada tahun 2023.

Tabel 5. Jumlah sisa perkara tahun 2022 yang diputus tahun 2023

Jenis Perkara	Sisa Perkara tahun 2022	Sisa Perkara tahun 2022 yang diputus tahun 2023	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
GUGATAN	28	28	100 %
PERMOHONAN	0	0	100%

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, batas penyelesaian perkara yaitu maksimal 3 bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding dan maksimal 5 bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama. Berikut ini rincian jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang diputus tepat waktu pada tahun 2023.



Tabel 6. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus tepat waktu

NO	PERKARA PUTUS TAHUN 2023		
	KURANG DARI 3 BULAN	3-5 BULAN	5-12 BULAN
1	68/G/2022/PTUN.PBR	45/G/2022/PTUN.PBR	38/G/TF/2022/PTUN.PBR
2	69/G/KI/2022/PTUN.PBR	47/G/2022/PTUN.PBR	42/G/TF/2022/PTUN.PBR
3	70/G/KI/2022/PTUN.PBR	48/G/2022/PTUN.PBR	46/G/2022/PTUN.PBR
4	71/G/KI/2022/PTUN.PBR	52/G/TF/2022/PTUN.PBR	49/G/2022/PTUN.PBR
5	31/G/2023/PTUN.PBR	54/G/2022/PTUN.PBR	51/G/2022/PTUN.PBR
6	39/G/2023/PTUN.PBR	55/G/2022/PTUN.PBR	53/G/2022/PTUN.PBR
7	43/G/2023/PTUN.PBR	56/G/2022/PTUN.PBR	59/G/2022/PTUN.PBR
8	47/G/2023/PTUN.PBR	57/G/2022/PTUN.PBR	60/G/TF/2022/PTUN.PBR
9	54/G/2023/PTUN.PBR	58/G/2022/PTUN.PBR	61/G/2022/PTUN.PBR
10		62/G/2022/PTUN.PBR	64/G/2022/PTUN.PBR
11		63/G/2022/PTUN.PBR	67/G/2022/PTUN.PBR
12		65/G/2022/PTUN.PBR	2/G/2023/PTUN.PBR
13		66/G/2022/PTUN.PBR	3/G/TF/2023/PTUN.PBR
14		1/G/2023/PTUN.PBR	4/G/2023/PTUN.PBR
15		7/G/TF/2023/PTUN.PBR	5/G/2023/PTUN.PBR
16		9/G/2023/PTUN.PBR	6/G/TF/2023/PTUN.PBR
17		10/G/2023/PTUN.PBR	8/G/2023/PTUN.PBR
18		11/G/TF/2023/PTUN.PBR	12/G/2023/PTUN.PBR



NO	PERKARA PUTUS TAHUN 2023		
	KURANG DARI 3 BULAN	3-5 BULAN	5-12 BULAN
19		18/G/TF/2023/PTUN.PBR	13/G/2023/PTUN.PBR
20		19/G/2023/PTUN.PBR	14/G/2023/PTUN.PBR
21		20/G/2023/PTUN.PBR	15/G/2023/PTUN.PBR
22		21/G/2023/PTUN.PBR	16/G/2023/PTUN.PBR
23		22/G/2023/PTUN.PBR	17/G/2023/PTUN.PBR
24		23/G/2023/PTUN.PBR	
25		24/G/2023/PTUN.PBR	
26		26/G/2023/PTUN.PBR	
27		27/G/2023/PTUN.PBR	
28		28/G/2023/PTUN.PBR	

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI

Berikut ini rincian jumlah perkara di tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi

- Jumlah Perkara putus tahun 2023 adalah sebanyak 55 perkara, dikurangi perkara yang mengajukan Banding sebanyak 38 perkara, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak **17 Perkara**.
- Perkara banding yang dimohonkan tahun 2023 sebanyak 38 perkara, dikurangi dengan jumlah Perkara Banding yang putus tahun 2023 dan mengajukan permohonan Kasasi sebanyak 28 perkara, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi: **10 Perkara**.



- c) Perkara kasasi yang dimohonkan tahun 2023 sebanyak 28 perkara, dikurangi dengan jumlah Perkara Kasasi yang putus tahun 2023 dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebanyak 10 perkara. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali/PK adalah **18 perkara**.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memberikan pelayanan prima dengan mengutamakan penyelesaian perkara tata usaha negara secara profesional. Hal ini terbukti dengan didatarkannya Predikat *Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu terakreditasi A dengan nilai 90,68 tertanggal 7 s.d. 9 April 2022.

Pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Korupsi dilakukan setiap hari kerja menggunakan form digital. Dilaporkan ke Ditjen Badilmiltun MARL.

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan *advice* hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pengadaan Jasa Konsultan Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum yang bersumber dari dana APBN DIPA 05 TA 2023 Nomor SP DIPA-005.05.2.578823/2023 tanggal 30 November 2022 dilaksanakan dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung. Berikut data alokasi dan realisasi anggaran Posbakum pada satker Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2023.



Tabel 7. Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No	Satuan Kerja	Jumlah Anggaran Posbakum (Rp.)	Realisasi Anggaran Posbakum		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum (orang)
			(Rp.)	(%)	
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	Rp.32.900.000	Rp 32.889.140	99.96 %	103

2. PERKARA PRODEO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan dari dana APBN DIPA TA 2023 Nomor SP DIPA-005.05.2.578823/2023 tanggal 30 November 2022. Berikut data Prodeo pada pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2023 .

Tabel 8. Perkara prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan Th. 2023	Jumlah Anggaran Prodeo (Rp.)	Realisasi Anggaran Prodeo	
				(Rp.)	(%)
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	1	Rp. 10.423.000	Rp. 9.923.000	95.20 %



BAB 3

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru didukung oleh Sumber Daya Manusia dibagian Teknis Yudisial, bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan. Pengelolaan dan pembinaan pegawai pada tahun 2023 dilakukan salah satunya dengan pelatihan dan bimbingan teknis, dengan tujuan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2023 mendapatkan penambahan Hakim dan Pegawai sebanyak 3 (tiga) orang dan Pengurangan Hakim dan pegawai akibat promosi dan mutasi jabatan.



Namun masih ada mengalami kekosongan pada Satu formasi jabatan dan kekurangan sumber daya manusia khususnya Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. Berikut ini rincian sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 2023.

1. SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Pada 31 Desember 2023 Jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2023 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang terdiri dari 9 (sembilan) orang Hakim dan 20 (dua puluh) Pegawai dan 7 (tujuh) orang PPNPN. Rincian sumber daya manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Golongan
1.	Hariyanto Sulistyo Wibowo, S.H.	Ketua	Pembina Utama Madya (IV/d)
2.	Darmawi. S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina Utama Madya (IV/d)
3.	Selvie Ruthyarodh, S.H.	Hakim	Pembina (IV/a)
4.	Ros Endang Naibaho, S.H.	Hakim	Penata Tk. I (III/d)
5.	Rendi Yurista, S.H., M.H.	Hakim	Penata Tk. I (III/d)
6.	Rahmad Tobrani, S.H., M.H.	Hakim	Penata Tk. I (III/d)
7.	Hari Purnomo, S.H.	Hakim	Penata Tk. I (III/d)
8.	Endri, S.H.	Hakim	Penata Muda Tk. I (III/b)
9.	Rahmadian Novira, S.H., M.H.	Hakim	Penata Muda Tk. I (III/b)
10.	Ahmad Taufik Lubis, S.H., M.H.	Panitera	Pembina Tingkat I (IV/b)
11.	Suharno, S.T.	Sekretaris	Pembina (IV/a)
12.	Suryadi, S.H.	Panmud Perkara	Penata Tk. I (III/d)



No	Nama	Jabatan	Keterangan
13.	Zulfadli Nasution, S.H., M.H.	Panmud Hukum	Penata (III/c)
14.	Ice Setiawati, S.E., S.H.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Penata Tk. I (III/d)
15.	Anditiawarman B, S.H.	Kasubbag PTIP	Penata Tk. I (III/d)
16.	Awaluddin, A.Md.	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
17.	Dewi Mona Sari, A.Md.	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
18.	Yunita Ariani, A.Md., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I (III/b)
19.	Ramadanis, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda (III/a)
20.	Gusneti	Juru Sita Pengganti	Pengatur Muda Tk.I (III/b)
21.	Azman Meirizki	Juru Sita Pengganti	Pengatur Muda Tk.I (III/b)
22.	Ammar, S.IP	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)
23.	Rafiqa Maharani Siregar, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)
24.	Ekawati, S.E., S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata (III/c)
25.	M. Rizqi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda Tk.I (III/b)
26.	Mhd. Arief Rizky, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penata Muda Tk.I (III/b)



No	Nama	Jabatan	Keterangan
27.	Wiwin Susanti, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)
28.	Ghalia Dyandra Putri Aqiella, Amd., S.I.	Arsiparis	Pengatur (II/c)
29.	Juliana	PPNPN	
30.	Agus Chandra, S.H.	PPNPN	
31.	Yunashril Hadi, A.Md., S.H.	PPNPN	
32.	Marde Wiyelde, S.Sos	PPNPN	
33.	Roganda Tua Sihombing, S.H.	PPNPN	
34.	Al Haris	PPNPN	
35.	Rico Suzandi Putra	PPNPN	

2. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK GOLONGAN

Jumlah Hakim dan Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2023 sebanyak 28 Orang, Berikut rincian Jumlah hakim dan pegawai berdasarkan kelompok Golongan.

Tabel 10. SDM berdasarkan kelompok Golongan

NO	Golongan IV (orang)	Golongan III (orang)	Golongan II (Orang)	Golongan I (Orang)
1	4	23	1	-

3. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2023 berdasarkan kelompok Pendidikan.



Tabel 11. SDM berdasarkan kelompok Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan (Orang)						
	S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA
1	-	7	16	3	-	-	2

4. PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA

Pada tahun 2023 terdapat 5 orang yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

1. Azman Meirizki (SATYALENCANA KARYA SATYA XXX)
2. Gusneti (SATYALENCANA KARYA SATYA XXX)
3. Ramadanis, S.H. (SATYA KARYA SEWINDU)

B. PROMOSI & MUTASI

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membutuhkan sumber daya manusia di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan dikarenakan pada tahun 2023 terdapat mutasi dan promosi Hakim dan Pegawai, baik mutasi masuk ataupun mutasi keluar. Berikut rincian promosi dan mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Tabel 14. Mutasi masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

NO	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi dari)
1	Hariyanto Sulistyo Wibowo, S.H.	Ketua	PTUN Kendari
2	Ros Endang Naibaho, S.H.	Hakim	PTUN Mataram
3	Rahmad Tobrani, S.H., M.H.	Hakim	PTUN Padang
4	Hari Purnomo, S.H., M.H.	Hakim	PTUN Tanjung Pinang



NO	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi dari)
5	Rahmadian Novira, S.H., M.H.	Hakim	PTUN Denpasar
6	Ahmad Taufik Lubis, S.H., M.H.	Panitera	PTUN Medan
7	Suharno, S.T.	Sekretaris	PTUN Bandar Lampung
8	Suryadi, S.H.	Panmud Perkara	PTUN Padang
9	Ammar, S.IP.	Analisis Kepegawaian	PTUN Pangkal Pinang

Tabel 15. Mutasi Keluar dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

NO	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi keluar ke)
1	Cusi Aprilia Hartanti, S.H.	Hakim	PTUN Semarang
2	Santi Octavia, S.H., M.Kn.	Hakim	PTUN Semarang
3	Erick Siswandi S, S.H.	Hakim	PTUN Medan
4	Debora DR Parapat, S.H., M.Kn.	Hakim	PTUN Medan
5	Misbah Hilmy, S.H.	Hakim	PTUN Bandung
6	Agustin, S.H., M.H.	Panitera	PTUN Medan
7	Nur Sujud, S.H.	Panmud Perkara	PTUN Medan
8	Dora Natalia S, S.E., M.M.	Kasubag Umum dan Keuangan	PTUN Pangkal Pinang
9	Agnes Fransisca, S.H.	Panitera Pengganti	PTUN Medan

C. Pensiun

Pada tahun 2023 tidak ada pegawai yang pensiun.



D. DIKLAT

Kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia teknis peradilan dilakukan dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode untuk mewujudkan tenaga teknis dan non teknis peradilan yang profesional, berintegritas dan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi ini, diarahkan untuk meningkatnya kualitas penyelenggaraan, peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap badan peradilan. Berikut rincian jumlah hakim dan pegawai yang mengikuti diklat teknis dan diklat menpin pada tahun 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Tabel 16. Diklat dan Bimbingan Teknis bagi Hakim, Pegawai dan PPNP

No	Nama	Diklat / Bimbingan Teknis
1.	Hariyanto Sulistyo Wibowo, S.H.	• Pembinaan dalam rangka peningkatan integritas dan anti korupsi bagi pimpinan pengadilan; • Bimbingan teknis pendalaman sengketa pemilihan kepala daerah bagi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; • Bimbingan teknis pendalaman sengketa proses pemilihan umum bagi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
2.	Selvie Ruthyarodh, S.H.	• Bimbingan teknis pendalaman sengketa proses pemilihan umum bagi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; • Pelatihan teknis yudisial sengketa pertanahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara;



No	Nama	Diklat / Bimbingan Teknis
3.	Ros Endang Naibaho, S.H.	• Bimbingan teknis pendalaman sengketa proses pemilihan umum bagi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; • Bimbingan teknis pendalaman manajemen pemeriksa sengketa lingkungan hidup pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja bagi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
4.	Rendi Yurista, S.H., M.H.	• Bimbingan teknis pendalaman sengketa proses pemilihan umum bagi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; • Bimbingan teknis akses peradilan dan perlindungan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan tata usaha negara;
5.	Rahmad Tobrani, S.H., M.H.	• Bimbingan teknis pemeriksaan sengketa kepegawaian bagi Hakim Tata Usaha Negara;
6.	Hari Purnomo, S.H.	• Bimbingan teknis pendalaman sengketa proses pemilihan umum bagi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
7.	Endri, S.H.	• Bimbingan teknis pendalaman sengketa proses pemilihan umum bagi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; • Pembinaan dalam rangka peningkatan integritas dan anti korupsi bagi pimpinan pengadilan;
8.	Rahmadian Novira, S.H., M.H.	• Pelatihan teknis tentang peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum bagi Hakim di 4 (empat) lingkungan peradilan;



No	Nama	Diklat / Bimbingan Teknis
9.	Ahmad Taufik Lubis, S.H., M.H.	• Bimbingan teknis kepaniteraan pada lingkungan peradilan tata usaha negara diwilayah hukum PTTUN Medan dan PTTUN Palembang;
10.	Suharno, S.T.	• Bimbingan teknis tentang pedoman tata naskah dinas dan penyusunan LKJIP; • Bimbingan teknis inventaris data BMN dan pendampingan pengusulan RKBMN melalui aplikasi E-Sadewa; • Pelatihan manajemen pengelolaan barang milik negara; • Bimbingan teknis tentang implementasi kebijakan standar pelayanan informasi publik di lingkungan peradilan tata usaha negara;
11.	Suryadi, S.H.	• Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara; • Bimbingan teknis administrasi upaya hukum banding secara elektronik di lingkungan peradilan tata usaha negara; • Bimbingan teknis kepaniteraan pada lingkungan peradilan tata usaha negara diwilayah hukum PTTUN Medan dan PTTUN Palembang;
12.	Anditiawarman B, S.H.	• Bimbingan teknis tentang pedoman tata naskah dinas dan penyusunan LKJIP;
13.	Azman Meirizki	• Peningkatan kompetensi Jurusita di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14.	Mhd. Arief Rizky, S.E.	• Pelatihan <i>Online</i> manajemen ASN Angkatan III s.d. IV;



No	Nama	Diklat / Bimbingan Teknis
15.	Wiwin Susanti, S.H.	• Bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara; • Pelatihan kepemimpinan dasar kader bela negara dan manajemen administrasi peradilan gelombang XI s.d XIV tahun 2023;
16.	Yunasril Hadi, Amd., S.H.	• Bimbingan teknis inventaris data BMN dan pendampingan pengusulan RKBMN melalui aplikasi E-Sadewa;



BAB 4

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Program kerja Pengadilan TUN Pekanbaru adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 (tiga) program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker PengadilanTUN Pekanbaru, antara lain sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung RI;
3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;

Realisasi anggaran dan pengelolaan PNBP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Tahun 2023 dijelaskan pada tabel dibawah ini.

1. REALISASI DIPA 01 (NO. SP DIPA-005.01.2.57822/2023)

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	4.760.047.000	4.556.565.006	95.73	203.481.994	4.27
	Belanja Barang	1.552.198.000	1.549.820.293	99.85	2.377.707	0.15
	Belanja Modal	249,000,000	249.000.000	100	0	0
	Total	6.562.145.000	6.356.285.299	96.86	205.859.701	3.14

2. REALISASI DIPA 05 (NO. SP DIPA-005.05.2.578823/2023)

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 05

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Barang	49.323.000	48.682.410	98.70	640.590	1.30



3. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Berikut rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru:

A. Realisasi PNBP DIPA 01

Tabel 19. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 01 Tahun 2023

No	Bulan Laporan	Kode Akun	
		425131	425122
1	Januari	1.180.410	-
2	Februari	4.507.280	-
3	Maret	1.349.040	-
4	April	1.349.040	-
5	Mei	1.686.300	-
6	Juni	1.686.300	13.677.000
7	Juli	1.349.040	-
8	Agustus	1.637.670	-
9	September	10.046.670	-
10	Oktober	1.686.300	-
11	November	1.517.670	-
12	Desember	1.517.670	-
TOTAL		29.513.390	13.677.000

Akun 425131: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Akun 425122: Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin



B. Realisasi PNBP DIPA 05

Tabel 20. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 05 Tahun 2023

No	Bulan Laporan	Kode Akun		
		425232	425233	425239
1	Januari	-	1.190.000	3.472.400
2	Februari	-	380.000	2.190.650
3	Maret	-	690.000	3.585.500
4	April	20.000	860.000	1.076.500
5	Mei	200.000	920.000	2.901.900
6	Juni	160.000	450.000	1.995.500
7	Juli	140.000	620.000	2.103.500
8	Agustus	150.000	670.000	2.377.000
9	September	70.000	580.000	3.901.600
10	Oktober	210.000	730.000	1.993.000
11	November	180.000	1.000.000	2.288.100
12	Desember	140.000	420.000	2.189.500
TOTAL		1.270.000	8.510.000	30.075.150

Akun 425232: Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan

Akun 425233: Pendapatan Ongkos Perkara

Akun 425239: Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya



B. PENGELOLAAN SARANA & PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2023 meliputi tanah dan bangunan Kendaraan Dinas, mesin non TIK, mesin non TIK, Mesin TIK dan Prasarana Lainnya.

1. TANAH

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berupaya untuk terus mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib pengelolaan dan penatausahaan BMN. Pengadilan Tata Usaha Negara terus melakukan inventarisasi legalitas Kepemilikan seluruh BMN, khususnya sertifikat tanah. Hal ini disebabkan kompleksitas masalah tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang – rundangan harus berstatus milik pemerintah Republik Indonesia. Berikut rincian progres pelaksanaan sertifikasi tanah selama tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Tabel 21. Daftar Tanah

NO	Satuan Kerja	Sudah sertifikat	Nilai	Belum Sertifikat	Total
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	Bidang Kantor Luas 4.399 m2	Rp 14.485.471.000	-	6 .699 M2
2.		Bidang Rumah Dinas Luas 2.300 m2	Rp. 2.708.327.000	-	

2. TANAH & GEDUNG

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) adalah suatu bentuk surat keputusan dari Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang. Satuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN merupakan administrasi yang melekat pada materiil BMN itu sendiri sehingga harus dimiliki oleh setiap BMN yang sesuai ketentuan untuk menghindari duplikasi, kehilangan arsip data serta terjaminnya kepastian hukum BMN itu sendiri. Berikut rincian tanah dan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah sudah/belum PSP tahun 2023.



Tabel 22. Daftar PSP Tanah & Gedung

No	Satuan Kerja	Nama Aset	Sudah PSP	Belum PSP
			Keterangan	Keterangan
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	Bangunan Kantor Depan	1.101 m2	-
		Bangunan Kantor Belakang	745 m2	-
		Bangunan Rumah Dinas	9 unit tipe C	-

3. KENDARAAN DINAS

Terdapat kendaraan dinas roda 2 (dua) dengan NUP 10 BM 2756 TP dengan status hilang dan sedang dalam proses penghapusan. Berikut rincian jumlah penetapan status penggunaan (PSP) kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2023.

Tabel 23. Daftar PSP Kendaraan dinas

No	Satuan Kerja	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)	Jumlah Kendaraan dinas yang Sudah PSP	Jumlah Kendaraan dinas yang Belum PSP
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	Kendaraan Roda 4	4	4	-
		Kendaraan Roda 2	5	5	-

4. MESIN NON TIK

Penetapan status penggunaan (PSP) Mesin Non TIK pada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Pengadilan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 24. Daftar PSP Mesin Non TIK

No	Satuan Kerja	Jumlah Unit	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	622	566	56



5. MESIN TIK

Penetapan status penggunaan (PSP) Mesin TIK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2023 telah mendapatkan PSP sebanyak 31 unit.

Tabel 25. Daftar PSP Mesin TIK

No	Satuan Kerja	Jumlah Unit	Jumlah Sudah PSP	Jumlah Belum PSP
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	102	31	71

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengintegrasikan pelayanan dengan teknologi informasi sebagai penunjang utama kelancaran dan kemudahan pelayanan Publik. Pelayanan teknis dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Court dan SIPP.

6. IMPLEMENTASI E-COURT

Ecourt adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

Pada tahun 2023, PTUN Pekanbaru telah menerapkan E-Court sebagai tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian direvisi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.



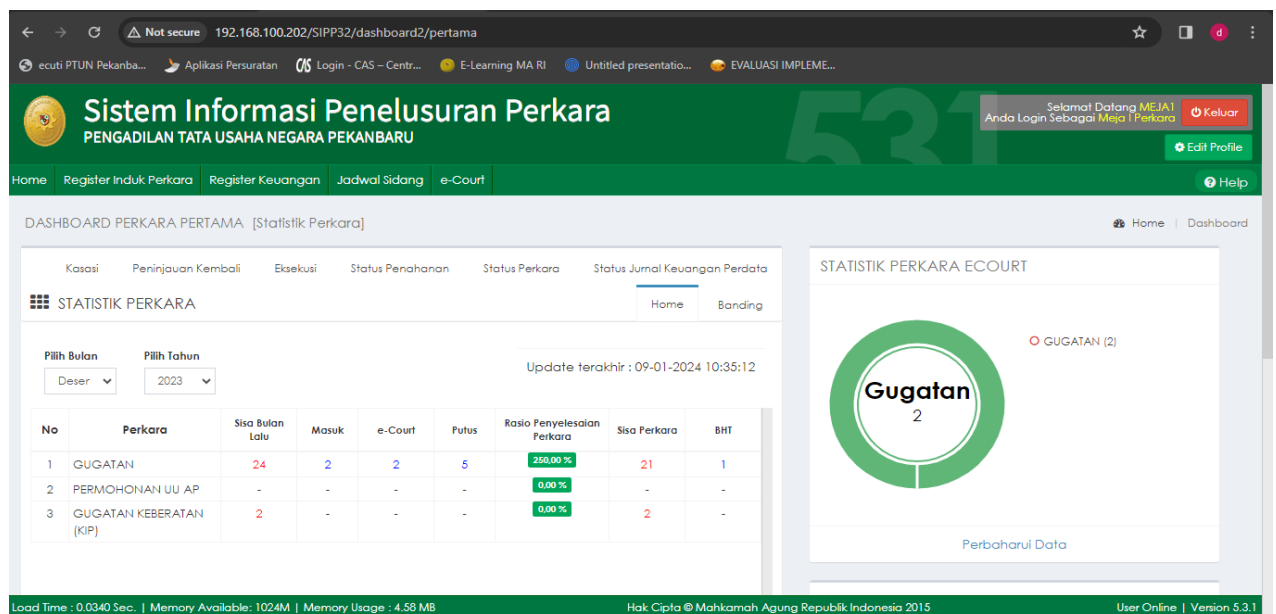
Penggunaan e-Court sangat membantu masyarakat untuk menghemat waktu dan meningkatkan efesiensi, dikarenakan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan luas. Sehingga, isu utama *access to justice* dapat dipecahkan dengan adanya e-Court. Rincian jumlah perkara yang didaftarkan melalui ecourt, dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Implementasi E-Court Tahun 2023

No	PENGADILAN	JANUARI - DESEMBER 2023						
		JUMLAH PERKARA		% e-Litigasi	PENGGUNA LAYANAN E-LITIGASI			
		e-Court	e-Litigasi		Pengguna Terdaftar	%	Pengguna Lainnya	%
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	54	54	100%	58	100%	3	100%
JUMLAH		108		100%	58	100%	3	100%

7. IMPLEMENTASI SIPP

Pada tahun 2023, Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah *diupdate* hingga **versi 5.1.0**, sehingga aplikasi SIPP bisa terintegrasi dengan e-Court dan direktori putusan Mahkamah Agung RI.





BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMIN MUTU

PTUN Pekanbaru terus berupaya meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi “Badan Peradilan Yang Agung”. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Militer dan TUN. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badimiltun ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini, selain itu juga untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*).



Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- A. Kepemimpinan (*leadership*);
- B. Perencanaan Strategis (*strategic planning*);
- C. Fokus Pelanggan (*customer focus*);
- D. Sistem Dokumentasi (*document system*);
- E. Manajemen Sumber Daya (*resource management*);
- F. Manajemen Proses (*process management*); dan
- G. Hasil Kinerja (*performance results*).

Semenjak tahun 2019 hingga saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah terakreditasi dan disurveillance dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27. Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Satuan Kerja	Terakreditasi	Nilai	Tanggal APM/Surveillance	Keterangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	A (Excellent)	93,38	20 s.d. 22 Februari 2019	Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	A (Excellent)	90,68	7 s.d. 9 April 2022	Surveillance I

1. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Kerjasama access to justice and justice for all sehingga masyarakat pencari keadilan semakin luas dan mudah mengetahui, memahami, serta memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui jalur Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penandatanganan MoU ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023.



2. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan PT. Pos Indonesia tentang penguatan implementasi pengiriman surat perkara pada tanggal 6 Oktober 2023.



3. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Rumah Sakit Sansani tentang peningkatan pelayanan kesehatan bagi Hakim dan Pegawai pada tanggal 1 Desember 2023.



4. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Provinsi Riau. LBH Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning akan menjadi mitra dalam pemberian layanan pos bantuan hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Penandatanganan MoU dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023.





B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menerapkan Pelayanan terpadu Satu Pintu sesuai SK Dirjen Badilmiltun No.462/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PTSP PTUN Pekanbaru terdiri dari lima loket.

1. Loker 1 – Penerimaan Surat-surat;
2. Loker 2 – Kasir;
3. Loker 3 – Pendaftaran Perkara;
4. Loker 4 – Produk Pengadilan;
5. Loker 5 – Informasi dan Pengaduan.

Pada PTSP PTUN Pekanbaru juga terdapat loket khusus Layanan Prioritas yang khusus digunakan untuk melayani pencari keadilan yang termasuk kelompok rentan (Lansia, Wanita Hamil, Ibu Menyusui, dan Penyandang Disabilitas). Untuk melengkapi layanan yang prima, juga terdapat ruang Laktasi dan toilet khusus disabilitas.

Selain itu, terdapat loket inzage, pojok e-Court, Mesin Antrian Sidang, dan kios-K yang dapat digunakan oleh Pencari Keadilan di PTUN Pekanbaru. Pada Kios-K terdapat aplikasi SIANTAM (Sistem Informasi Pelayanan Tamu) yang dapat digunakan pencari keadilan untuk mendaftarkan kehadiran ataupun untuk mendapatkan antrian PTSP. Aplikasi SIANTAM juga dapat diakses mandiri oleh masyarakat secara *online* melalui gawai masing-masing. Selain itu, kios-K juga bisa digunakan untuk mengisi survey kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi secara *online*.

c. PROSEDUR PTSP SEBAGAI BERIKUT:

- a. Pemohon mengambil nomor antrian melalui aplikasi SIANTAM;
- b. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan;



- c. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke Kepaniteraan/Kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.
- d. JAM LAYANAN:
 - a. **Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d. 16.30 WIB**
Istirahat : 12.00 s.d. 13.00 WIB
 - b. **Jumat : 08.00 s.d. 15.30 WIB**
Istirahat : 11.30 s.d. 13.00 WIB
- e. PENGATURAN MEJA PTSP
 - a. Meja-meja PTSP ditempatkan pada lobi yang menghadap pintu masuk dan dilengkapi kursi-kursi untuk pemohon.
 - b. Bentuk dan ukuran meja PTSP harus memudahkan pemberian layanan bagi pemohon, tidak terkecuali penyandang disabilitas.
 - c. Di atas meja PTSP tersedia komputer, formulir pengaduan dan buku regsiter pengaduan, formulir dan buku register permohonan informasi, dan brosur yang berisi tentang layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
 - d. Terdapat tulisan PTSP di dinding belakang/backdrop ruang PTSP.
 - e. Pada setiap ruangan layanan agar disediakan kursi untuk pengunjung/pengguna Layanan PTSP yang mengantre atau menunggu.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas merupakan lambang komitmen untuk senantiasa menjalankan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima mewujudkan Kinerja Peradilan yang Prima. Pelayanan publik yang prima dari Mahkamah Agung RI dan



Badan Peradilan di bawahnya dapat diwujudkan salah satunya dengan terus berupaya untuk responsif terhadap kondisi masyarakat dengan berinovasi untuk memenuhi pelayanan publik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara berkesinambungan terus melakukan pembenahan serta pembaharuan inovasi terhadap segala jenis layanan baik dari segi teknologi informasi dan sarana prasarana yang nantinya akan menunjang kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Berikut inovasi pelayanan publik yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Tabel 28. Inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No	Nama Inovasi	Keterangan
1	e-MARISA (Sistem Antrian Sidang Elektronik)	e-MARISA bertujuan untuk menertibkan persidangan dengan melakukan antrian persidangan. Aplikasi ini dapat menarik data jadwal sidang dari Aplikasi SIPP yang selanjutnya diolah sehingga data jadwal sidang tersebut tidak hanya mempunyai jam persidangan tetapi juga akan memiliki nomor urut antrian sidang serta dapat mengetahui para pihak yang hadir dan tidak hadir dalam persidangan. Pihak yang menunggu giliran persidangan juga dapat melihat kesiapan panitera pengganti dan majelis hakim pada tampilan Display Antrian Sidang
2	SIANTAM (Sistem Layanan Tamu) berbasis Digital	Sistem Layanan Tamu Berbasis Digital merupakan aplikasi berbasis online yang digunakan sebagai salah satu cara untuk digitalisasi pelayanan khususnya dalam Pelayanan Tamu, yaitu: a. pengumpulan data pengunjung di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. file data pengunjung ini nantinya dijadikan sebagai data responden pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. b. Digitalisasi Buku Tamu PTUN Pekanbaru c. Digitalisasi Antrian PTSP d. Digitalisasi Surat masuk ke PTUN Pekanbaru menggunakan surel (e-mail) resmi PTUN Pekanbaru e. Digitalisasi brosur PTUN Pekanbaru yang dapat diakses dengan melakukan pemindaian <i>barcode</i> .

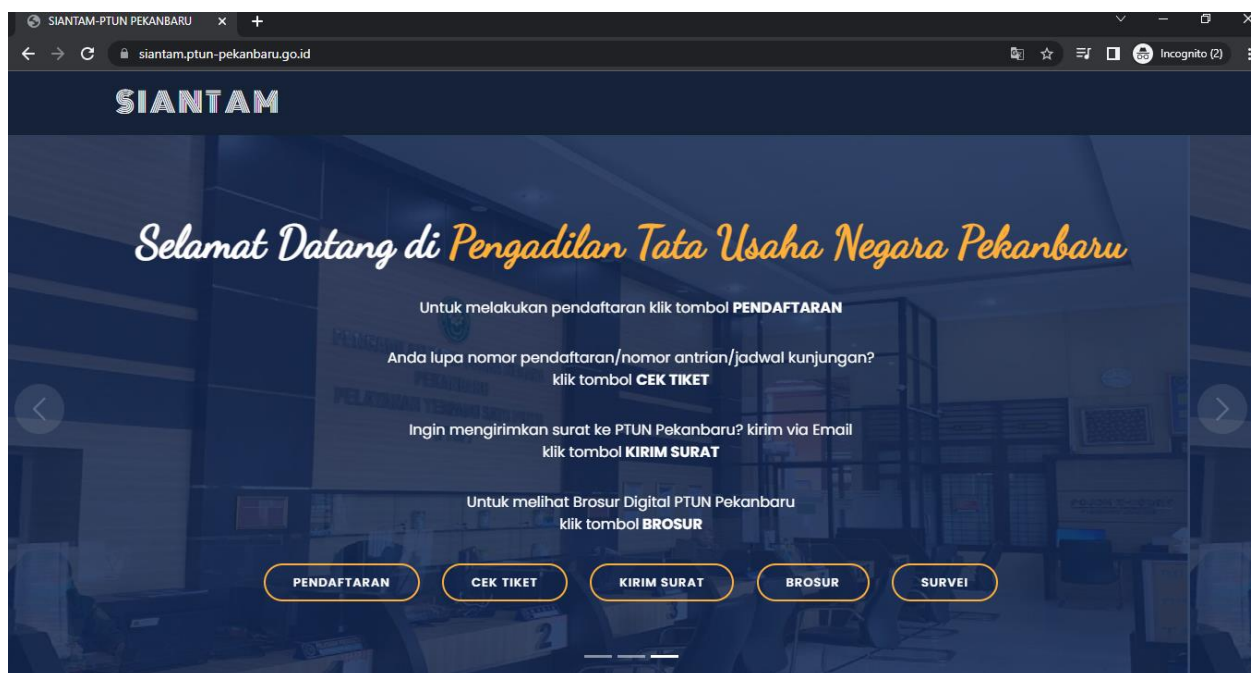


No	Nama Inovasi	Keterangan
3	Podcast SANTUN (Semua tentang TUN)	Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet (<i>Channel</i> Youtube PTUN Pekanbaru). Podcast SANTUN ini digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan zona integritas, serta sebagai <i>public campaign</i> dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4	Sirankas	Aplikasi SIRANKAS ini digunakan khusus untuk INZAGE dalam perkara berjalan, sesuai Pasal 81 UU PTUN yang berbunyi "Dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya"
5	Posbakum Online	Aplikasi Posbakum <i>Online</i> ini adalah Sistem Informasi Permohonan Posbakum dan Prodeo Secara Elektronik sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan bantuan hukum melalui Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Permohonan Pembebasan biaya Perkara (Prodeo) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
6	Ruang Tunggu Terbuka	Ruang Tunggu terbuka digunakan oleh pihak yang mengunjungi PTUN Pekanbaru saat menunggu giliran untuk mendapatkan layanan di PTUN Pekanbaru. Ruang tunggu ini disediakan agar terciptanya integritas dan ketertiban dalam proses pelayanan di PTUN Pekanbaru
7	Layanan Prioritas	Pelayanan yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengakomodir keterbatasan penyandang disabilitas dalam menyerap informasi.
8	Pojok e-Court	Pemanfaatan media informasi sebagai sarana sosialisasi tentang pelaksanaan e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyediakan 1 unit PC dan Printer yang dapat digunakan oleh pihak untuk mengakses e-Court.



No	Nama Inovasi	Keterangan
9	Layanan Survey elektronik	Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi dilakukan dengan menggunakan teknologi digital yang dapat diakses melalui gawai.

Gambar 1. Halaman Depan Aplikasi SIANTAM





Gambar 2. Halaman Pendaftaran Kunjungan PTSP

PTUN PEKANBARU

siantam.ptun-pekanbaru.go.id/loket2/create

SIANTAM

DAFTAR SEBAGAI PENGUNJUNG PTSP

Pilih Layanan yang Saudara inginkan

Loket2 - Kasir Loket3 - Pendaftaran Loket4 - Produk Pengadilan

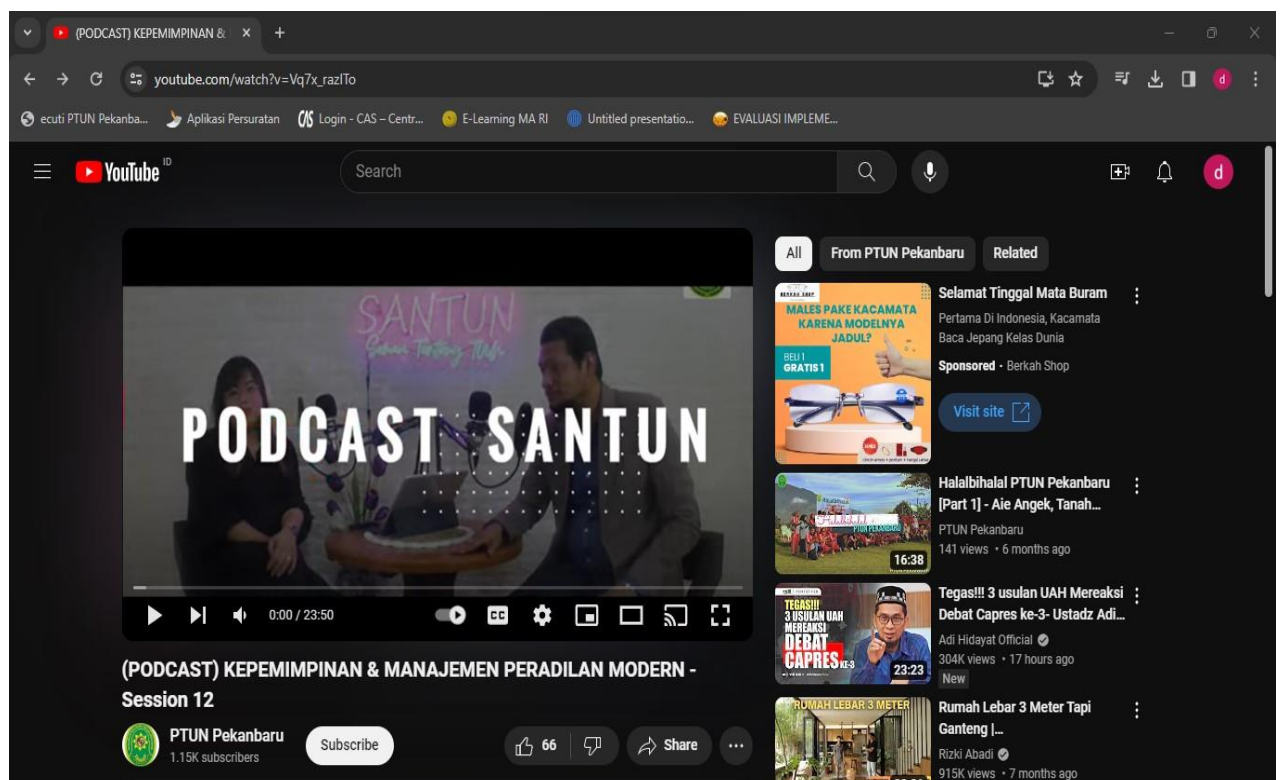
Nomor Pendaftaran
S-802

Nama Alamat

No HP/WA Email

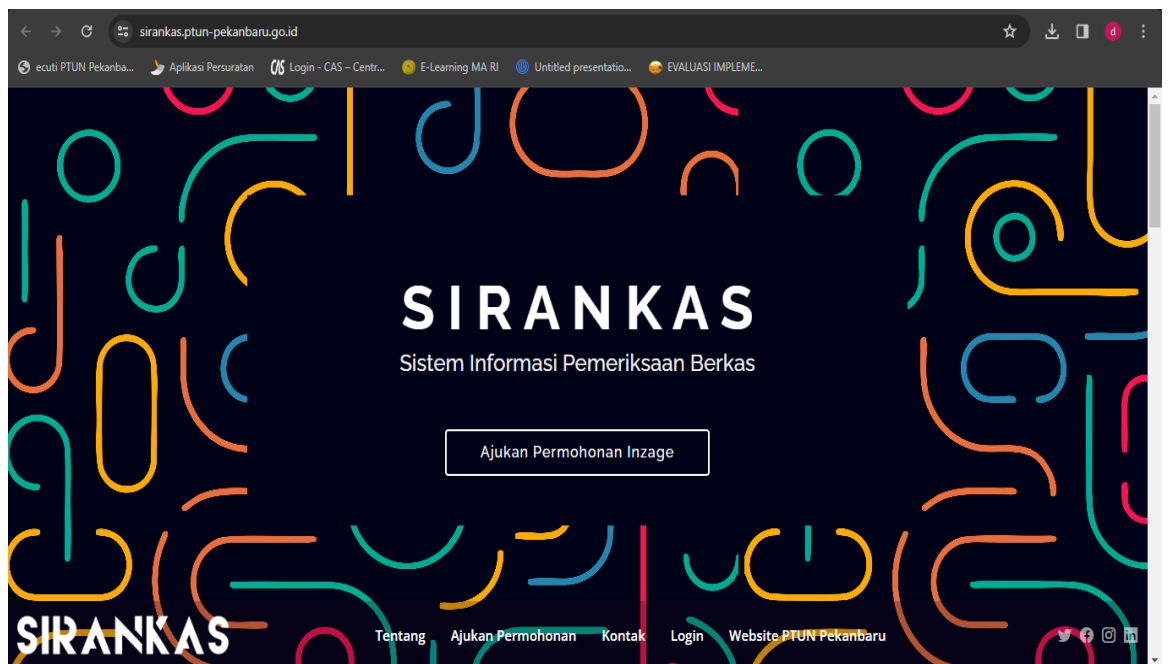
Keperluan
Loket 2 - Kasir

Gambar 3. Podcast PTUN Pekanbaru





Gambar 4. Halaman Depan Aplikasi SIRANKAS



Gambar 5. Halaman Depan Aplikasi Posbakum Online





Gambar 6. Jalur landai dengan hand trail



Gambar 7. Guiding block dari pagar hingga toilet difabel



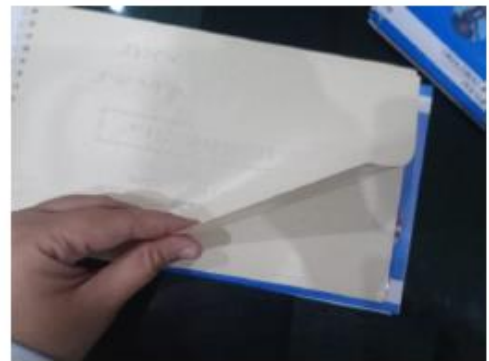
Gambar 8. Loker Prioritas



Gambar 9. Kursi Roda, Kruk



Gambar 10. Ruang Tunggu Prioritas



Gambar 11. Buku Informasi dengan tulisan Braille



Gambar 12. Toilet Khusus Disabilitas



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. PENGAWASAN INTERNAL

Ketua PTUN Pekanbaru mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor W1-TUN4/942/OT.01.3/7/2023, Tanggal 4 Juli 2023, Tentang Penunjukan Koordinator Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang Di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Adapun Tugas Hakim Pengawas Bidang adalah:

1. Bidang Teknis

- a. Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara, di PTUN Pekanbaru;



- b. Memantau & memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara;
- c. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara;
- d. Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding;
- e. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara;
- f. Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara;
- g. Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara;
- h. Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua PTUN Pekanbaru dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya

2. Bidang Kesekretariatan

- a. Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya;
- c. Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua PTUN Pekanbaru dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.

Adapun hasil pengawasan bidang pada PTUN Pekanbaru tahun 2023 secara umum sebagai berikut :

- 1. Pola Bindalmin telah berjalan sesuai ketentuan dalam buku Pola Bindalmin, namun masih terdapat kurang ketelitian dalam melaksanakan tugas;
- 2. Penerapan hukum acara dalam putusan PTUN Pekanbaru secara substansi sudah baik;



3. Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan terlaksana dengan baik;
4. Pelaksanaan teknis persidangan oleh Majelis Hakim PTUN Pekanbaru;
5. Penyusunan surat-surat yang terdapat pada Bundel B dan dalam berkas perkara tingkat banding secara umum telah terlaksana dengan baik;
6. Penyelesaian minutasasi berkas-berkas perkara, baik di Bagian Kepaniteraan telah berjalan baik. Dalam melaksanakan pengawasan PTUN Pekanbaru mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 7 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Perma nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawasan Bidang PTUN Pekanbaru adalah pengawasan melekat dimana serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan. Pengawasan disiplin Hakim dan pegawai pada PTUN Pekanbaru sudah baik, namun perlu ditingkatkan kinerja yang lebih baik dan professional;
8. Pembukuan Keuangan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya sudah sesuai peraturan;
9. Sistem administrasi perlengkapan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN sudah berjalan dengan baik;
10. Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan baik;
11. Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi;
12. Pengembangan Teknologi & Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah berjalan baik.

Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan program kerja apakah telah terlaksana sesuai rencana. Hasil pengawasan dilaporkan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 1 (Satu) triwulan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Koordinator Hakim Pengawas Bidang.



Tabel 29. Tabel Pengawasan Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No	Subjek Pengawasan	Objek Yang Diawasi	Waktu	Kesimpulan
1.	Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana			
	Kasubag dan staf KP	Administrasi kepegawaian dan ortala, SIKEP, Komdanas dan ruangan	Maret 2023	Temuan telah ditindak lanjuti
	Kasubag dan staf KP	Administrasi kepegawaian dan ortala, SIKEP, Komdanas dan ruangan	Juni 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
	Kasubag dan staf KP	Administrasi kepegawaian dan ortala, SIKEP, Komdanas dan ruangan	September 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
2.	Kasubag dan staf KP	Administrasi kepegawaian dan ortala, SIKEP, Komdanas dan ruangan	Desember 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
	Subbagian Umum dan Keuangan			
	Kasubag Umum dan keu serta staf	Administrasi Umum dan keuangan, Sapras, BMN Kebersihan Kantor	Maret 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
	Kasubag Umum dan keu serta staf	Administrasi Umum dan keuangan, Sapras, BMN Kebersihan Kantor	Juni 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
3.	Kasubag Umum dan keu serta staf	Administrasi Umum dan keuangan, Sapras, BMN Kebersihan Kantor	September 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
	Kasubag Umum dan keu serta staf	Administrasi Umum dan keuangan, Sapras, BMN Kebersihan Kantor	Desember 2023	Temuan telah ditindak lanjuti
	Subbagian PTIP			
	Kasubag PTIP dan staf	Administrasi PTIP, TI dan Jaringan	Maret 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
	Kasubag PTIP dan staf	Administrasi PTIP, TI dan Jaringan	Juni 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
	Kasubag PTIP dan Staf	Administrasi PTIP, TI dan Jaringan	September 2023	Temuan telah ditindaklanjuti



No	Subjek Pengawasan	Objek Yang Diawasi	Waktu	Kesimpulan
4.	Kasubag PTIP dan Pranata Komputer	Administrasi PTIP, TI dan Jaringan	Desember 2023	Temuan telah ditindak lanjuti
	Panitera Muda Perkara			
	Panmud Perkara dan staf	Admisnitration dan keuangan perkara	Maret 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
	Panmud Perkara dan staf	Admisnitration dan keuangan perkara	Juni 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
5.	Panmud Perkara dan staf	Admisnitration dan keuangan perkara	September 2023	Temuan telah ditindak lanjuti
	Panmud Perkara dan staf	Admisnitration dan keuangan perkara	Desember 2023	Temuan telah ditindak lanjuti
	Panitera Muda Hukum			
	Panmud Hukum dan staf	Administrasi Pankum, Statistik dan perkara ingkrah	Maret 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
6.	Panmud Hukum dan staf	Administrasi Pankum, Statistik dan perkara ingkrah	Juni 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
	Panmud Hukum dan staf	Administrasi Pankum, Statistik dan perkara ingkrah	September 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
	Panmud Hukum dan staf	Administrasi Pankum, Statistik dan perkara ingkrah	Desember 2023	Temuan telah ditindak lanjuti
	Administrasi PNBP			
	Kasir dan Bendahara Penerima	Adminstrasi PNBP	Maret 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
	Kasir dan Bendahara Penerima	Adminstrasi PNBP	Juni 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
	Kasir dan Bendahara Penerima	Adminstrasi PNBP	September 2023	Temuan telah ditindaklanjuti
	Kasir dan Bendahara Penerima	Adminstrasi PNBP	Desember 2023	Temuan telah ditindaklanjuti



B. EVALUASI

Pada tahun 2023 dilakukan evaluasi dan tindak lanjut atas Hasil Pengawasan terhadap bagian-bagian di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, antara lain:

1. Melaksanakan *briefing* setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
2. Melaksanakan *briefing* PTSP setiap pekan pada Senin pagi sebagai monitoring dan evaluasi pelayanan bagi pencari keadilan di PTUN Pekanbaru;
3. Perbaikan lahan parkir mobil untuk pencari keadilan;
4. Perbaikan pilar gedung kantor;
5. Pengadaan Televisi sebagai sarana pelayanan informasi publik.

Pada tahun 2023, evaluasi pelayanan peradilan juga dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan kegiatan sebagai berikut

1. Survei Kepuasan Masyarakat secara elektronik untuk melihat respon terhadap pelayanan publik. Hasil survei kepuasan pelanggan sejumlah 180 responden terhadap ruang lingkup layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** sebesar **94,58** dengan mutu pelayanan **SANGAT BAIK**.
2. Indeks Presepsi Korupsi secara elektronik untuk melihat hasil survei masyarakat terhadap Persepsi Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2023, hasil **Indeks Presepsi Korupsi (IPK)** terhadap 183 responden sebesar **95,97** dengan mutu presepsi **BERSIH DARI KORUPSI**.



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menjalankan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Meliputi pengimplementasian SIPP, e-Court, e- *filling* (pendaftaran perkara secara elektronik), e- *payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik) PTSP, layanan Prioritas. Meskipun pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum telah berjalan dengan baik, namun pengawasan dan pembinaan tetap dilaksanakan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tetap berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan memberikan pelayanan publik.



Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya;
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah menerapkan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih mengalami kendala antara lain:

1. Sumber daya manusia, khususnya Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara masih kurang;
2. Sarana dan prasarana gedung dan fasilitas perkantoran masih kurang
3. Gedung kantor yang tidak layak, tidak sesuai dengan prototype Pengadilan Kelas 1A.
4. Fasilitas rumah dinas Hakim kurang, dan banyak rumah dinas yang tidak terpelihara karena tidak tersedia anggaran perbaikan rumah dinas.

B. REKOMENDASI

Mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas.